

Dari Polarisasi Menuju Humanisasi: Reorientasi Pendidikan Pancasila bagi Generasi Digital Indonesia

Putri Hilmiyah Fahirah Absantik^{1*}, Ahmad Latip², Ari Amalia Kurnia³,
Labiibah⁴, Ade Nuraini⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi PPKn, STKIP Arrahmaniyah Depok

e-mail: hilmiyahfahirap@gmail.com, ahmadlatip179@gmail.com,
ariamalia20@gmail.com, tyasani87@gmail.com, novde48@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital telah mengubah cara generasi muda Indonesia memperoleh informasi, berkomunikasi, membangun identitas, dan berpartisipasi sebagai warga negara. Pada saat yang sama, ruang digital menghadirkan disinformasi, ujaran kebencian, ruang gema, segmentasi identitas, dan polarisasi sosial yang berpotensi melemahkan persatuan serta praktik nilai kemanusiaan. Artikel konseptual ini bertujuan menganalisis kebutuhan reorientasi Pendidikan Pancasila bagi generasi digital melalui perspektif humanisme. Kajian menggunakan tinjauan literatur naratif-kritis terhadap artikel jurnal yang diterbitkan terutama pada periode 2021–2026, dilengkapi dokumen kebijakan dan publikasi lembaga internasional yang relevan. Analisis dilakukan melalui identifikasi tema, perbandingan temuan, sintesis konseptual, dan pemetaan hubungan antara polarisasi digital, kewarganegaraan digital, nilai Pancasila, dan humanisasi pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pendidikan Pancasila memiliki posisi strategis untuk menggeser orientasi pembelajaran dari penguasaan pengetahuan normatif menuju praktik nilai dalam ruang digital. Reorientasi tersebut perlu mengintegrasikan literasi digital kritis, empati, dialog, toleransi, tanggung jawab, dan refleksi moral. Humanisasi Pendidikan Pancasila tidak berarti menolak teknologi, tetapi menempatkan teknologi dalam kerangka penghormatan terhadap martabat manusia dan persatuan. Artikel ini menawarkan kerangka Pancasila Digital Humanism yang menghubungkan literasi digital, kompetensi kewarganegaraan, dan pendidikan karakter untuk membentuk generasi digital yang kritis, etis, empatik, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Humanisasi; Pendidikan Pancasila; Polarisasi Digital; Generasi Digital; Kewarganegaraan Digital.

Abstract

Digital transformation has changed how Indonesian young people access information, communicate, construct identities, and participate as citizens. At the same time, digital spaces have generated challenges such as disinformation, hate speech, echo chambers, identity segmentation, and social polarization that may weaken social cohesion and the practice of

humanistic values. This conceptual article aims to analyze the need to reorient Pancasila Education for digital generations through a humanistic perspective. The study employs a critical-narrative literature review of journal articles published mainly between 2021 and 2026, complemented by relevant policy documents and international institutional publications. The analysis involved thematic identification, comparison of findings, conceptual synthesis, and mapping the relationships among digital polarization, digital citizenship, Pancasila values, and humanization in education. The review indicates that Pancasila Education has a strategic position in shifting learning from normative knowledge acquisition toward the lived practice of civic and ethical values in digital environments. Such reorientation should integrate critical digital literacy, empathy, dialogue, tolerance, responsibility, and moral reflection. Humanizing Pancasila Education does not imply rejecting technology; rather, it places technology within a framework that protects human dignity and social unity. This article proposes a conceptual framework of Pancasila Digital Humanism that connects digital literacy, civic competence, and character education to cultivate a critical, ethical, empathetic, and responsible digital generation.

Keywords : Humanization; Pancasila Education; Digital Polarization; Digital Generation; Digital Citizenship.

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah mengubah struktur kehidupan sosial dan pendidikan secara mendasar (Wirati et al., 2024). Media sosial, mesin pencari, platform video, dan kecerdasan buatan memungkinkan generasi muda memperoleh, memproduksi, dan menyebarkan informasi hampir tanpa batas ruang dan waktu. Perubahan tersebut membuka peluang bagi pembelajaran, partisipasi publik, dan penguatan jejaring sosial (Aulita et al., 2024). Namun, manfaat tersebut berjalan bersamaan dengan penyebaran misinformasi, disinformasi, ujaran kebencian, dan kekerasan daring. UNESCO menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran penting untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu bertindak etis dan bertanggung jawab dalam lingkungan fisik maupun digital (Amir & Nugraha, 2023).

Dalam konteks Indonesia, ruang digital juga menjadi arena pembentukan opini, identitas sosial, dan partisipasi politik generasi muda (Rachmadio et al., 2024). Mekanisme kurasi algoritmik dapat memperkuat kecenderungan pengguna untuk menerima informasi yang sesuai dengan pandangan sebelumnya (Syahlan et al., 2025). Penelitian mengenai TikTok menunjukkan bahwa ruang gema algoritmik dapat berhubungan dengan polarisasi wacana dan keterlibatan kewargaan digital generasi muda (Ridha et al., 2025). Kajian meta-analisis tentang filter bubble juga menunjukkan implikasinya terhadap pemahaman Pancasila dan potensi polarisasi opini yang mengancam persatuan (Achdyat et al., 2025). Dengan demikian, tantangan digital tidak hanya menyangkut kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan mempertahankan kualitas relasi sosial dan kehidupan demokratis.

Persoalan tersebut berkaitan langsung dengan Pendidikan Pancasila. Pancasila tidak semestinya berhenti sebagai pengetahuan mengenai lima sila, melainkan menjadi orientasi etis dalam memperlakukan manusia, membangun persatuan, bermusyawarah, dan

mewujudkan keadilan sosial. Dalam ruang digital, nilai tersebut diuji melalui tindakan konkret seperti memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghormati perbedaan pendapat, menjaga privasi, menolak ujaran kebencian, dan melakukan kontra-narasi terhadap konten yang merendahkan kelompok lain. Penelitian tentang Pancasila sebagai sumber etika digital menegaskan bahwa nilai Pancasila memiliki konsekuensi praktis bagi perilaku warga di ruang digital (Yusuf et al., 2024).

Masalahnya, pembelajaran kewarganegaraan berisiko menjadi terlalu normatif apabila nilai Pancasila lebih banyak diposisikan sebagai materi yang harus dipahami dan diingat daripada pengalaman sosial yang perlu dipraktikkan. Kajian tentang Pendidikan Kewarganegaraan dan Generasi Z menunjukkan bahwa praktik yang normatif dan kurang terhubung dengan realitas sosial kontemporer belum cukup kuat untuk membangun empati dan mencegah polarisasi (Haq, 2026). Kajian internasional juga menunjukkan bahwa digital citizenship sering digunakan sebagai istilah payung bagi aktivitas teknologi, tetapi belum selalu memberi ruang bagi peserta didik untuk mempraktikkan kewarganegaraan digital secara kritis (Choi et al., 2022). Karena itu, kebutuhan utamanya bukan sekadar menambahkan materi literasi digital, tetapi melakukan reorientasi pedagogis terhadap tujuan dan pengalaman belajar.

Perspektif humanisme menawarkan arah penting bagi reorientasi tersebut. Humanisme dalam pendidikan menempatkan peserta didik sebagai manusia yang memiliki martabat, pengalaman, kebebasan, tanggung jawab, dan kemampuan berkembang melalui relasi yang bermakna. Dalam konteks digital, humanisasi berarti memastikan bahwa kecanggihan teknologi tidak menggeser manusia menjadi sekadar pengguna, data, atau target algoritma. Pendidikan perlu membantu peserta didik mengenali manusia di balik layar, memahami konsekuensi sosial dari tindakan digital, dan membangun kebiasaan dialogis. Penelitian mengenai program pencegahan ujaran kebencian menunjukkan bahwa penguatan empati dan efikasi diri dapat meningkatkan kemampuan remaja melakukan counter-speech (Wachs et al., 2023a).

UNESCO juga menempatkan berpikir kritis, empati, kolaborasi, pengambilan keputusan etis, dan partisipasi bertanggung jawab sebagai kompetensi penting dalam kewarganegaraan digital (UNESCO, 2024, 2026). Prinsip tersebut memiliki titik temu dengan Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, musyawarah, dan keadilan sosial. Sejumlah penelitian Indonesia telah membahas hubungan Pancasila dengan literasi digital dan kewarganegaraan digital, tetapi masih terdapat ruang untuk memperkuat sintesis yang secara khusus menjadikan humanisasi sebagai respons pedagogis terhadap polarisasi digital (Isdaryanto et al., 2025; Fatmawati & Habibah, 2023).

Artikel ini bertujuan menganalisis kebutuhan reorientasi Pendidikan Pancasila bagi generasi digital Indonesia melalui perspektif humanisme. Kajian diarahkan pada tiga pertanyaan: bagaimana polarisasi digital menantang nilai Pancasila, mengapa pendekatan humanistik diperlukan, dan bagaimana kerangka Pancasila Digital Humanism dapat dirumuskan sebagai orientasi pedagogis. Kontribusi artikel terletak pada upaya menghubungkan literasi digital, kewarganegaraan digital, pendidikan karakter, dan nilai Pancasila dalam satu kerangka konseptual yang berorientasi pada pemanusiaan.

METODE

Artikel ini merupakan artikel konseptual berbasis tinjauan literatur naratif-kritis. Sumber utama berupa artikel jurnal ilmiah yang terbit terutama pada 2021–2026 dan relevan dengan tema Pendidikan Pancasila, digital citizenship, digital polarization, social media, hate speech, empathy, civic education, dan character education. Sumber tambahan berupa publikasi UNESCO dan OECD digunakan untuk memperkuat konteks global dan kebijakan pendidikan (Amelia et al., 2023).

Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar dan laman penerbit jurnal menggunakan kombinasi kata kunci "Pendidikan Pancasila era digital", "Pancasila digital citizenship", "digital polarization", "algorithmic echo chamber", "digital citizenship education", "empathy and hate speech", dan "humanistic education". Literatur dipilih berdasarkan relevansi, kebaruan, identitas publikasi yang dapat diverifikasi, serta kontribusinya terhadap pertanyaan kajian. Literatur dianalisis melalui identifikasi tema, pengelompokan konsep, perbandingan temuan, dan sintesis konseptual.

Empat domain utama digunakan dalam analisis, yaitu polarisasi digital, kompetensi kewarganegaraan digital, nilai Pancasila, dan humanisasi pendidikan. Temuan kemudian dipetakan untuk merumuskan kerangka Pancasila Digital Humanism. Karena artikel bersifat konseptual, hasil yang disajikan merupakan sintesis literatur dan bukan hasil pengukuran empiris langsung terhadap peserta didik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa polarisasi digital dan humanisasi pendidikan merupakan dua sisi dari persoalan yang sama. Polarisasi dapat muncul melalui penguatan jarak emosional, prasangka, dan ketidakmauan memahami perspektif lain. Mekanisme algoritmik, segmentasi identitas, dan budaya viral dapat memperkuat kondisi tersebut. Dalam konteks Pancasila, dampaknya terlihat pada melemahnya praktik kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah. Karena itu, Pendidikan Pancasila perlu menjadikan ruang digital sebagai konteks nyata pembentukan karakter kewarganegaraan.

Polarisasi digital tidak selalu berarti masyarakat terbagi secara mutlak menjadi dua kelompok. Polarisasi dapat berupa peningkatan permusuhan terhadap kelompok lain. Studi Ridha et al. (2025) mengenai TikTok menunjukkan mekanisme ruang gema algoritmik dalam polarisasi wacana, sedangkan Achdyat et al. (2025) menunjukkan hubungan filter bubble dengan polarisasi opini dan karakter Pancasila. Temuan tersebut menegaskan bahwa peserta didik perlu memiliki kemampuan untuk keluar dari lingkungan informasi yang homogen dan belajar berhadapan dengan perspektif berbeda secara kritis dan manusiawi.

Dari sisi nilai, sila kedua menghadapi tantangan ketika perbedaan pendapat disertai penghinaan dan dehumanisasi. Sila ketiga menghadapi tantangan ketika identitas kelompok lebih dominan daripada kesadaran sebagai bagian dari bangsa yang sama. Sila keempat menghadapi tantangan ketika perdebatan digital lebih mengutamakan kemenangan narasi daripada musyawarah. Oleh sebab itu, kebebasan berpendapat perlu dipelajari bersama tanggung jawab, etika, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Literasi digital merupakan fondasi, tetapi belum cukup apabila hanya didefinisikan sebagai kemampuan mencari dan mengevaluasi informasi. UNESCO (2024) menekankan

kemampuan mengakses, menilai, mencipta, menggunakan, dan berbagi informasi secara bertanggung jawab. Choi et al. (2022) juga menunjukkan bahwa digital citizenship perlu dipraktikkan secara kritis. Karena itu, literasi digital dalam Pendidikan Pancasila perlu bergerak menuju literasi etis dan humanistik: peserta didik tidak hanya bertanya apakah informasi benar, tetapi juga apa dampaknya terhadap manusia lain dan kepentingan bersama.

Humanisasi memberi dimensi yang sering hilang dari diskursus literasi digital, yaitu pertanyaan tentang manusia seperti apa yang dibentuk melalui teknologi. Peserta didik dapat sangat terampil menggunakan aplikasi tetapi belum tentu mampu mengelola konflik atau memahami perspektif orang lain. Penelitian Wachs et al. (2023a) menunjukkan bahwa program anti-ujaran kebencian meningkatkan empati, efikasi diri, dan counter-speech. Penelitian Wachs et al. (2023b) juga menunjukkan hubungan antara iklim kelas, empati, efikasi diri, dan kemampuan melawan ujaran kebencian. Dengan demikian, dimensi afektif merupakan bagian penting dari pendidikan kewarganegaraan.

Reorientasi Pendidikan Pancasila perlu menggeser pusat pembelajaran dari knowing Pancasila menuju living Pancasila. Knowing Pancasila merujuk pada kemampuan memahami konsep dan sejarah, sedangkan living Pancasila merujuk pada kemampuan menghidupkan nilai tersebut dalam tindakan. Perbedaan ini penting karena peserta didik dapat memahami makna persatuan tetapi tetap menunjukkan perilaku digital yang memecah belah. Studi tentang penerapan nilai kemanusiaan Pancasila di media sosial juga menegaskan pentingnya menerjemahkan sila kedua ke dalam perilaku komunikasi digital (Silaen & Najicha, 2023).

Reorientasi dapat dilakukan dengan menjadikan kasus digital nyata sebagai sumber belajar. Guru dapat menggunakan contoh hoaks, konflik komentar, cyberbullying, perdebatan politik, atau dilema penggunaan kecerdasan buatan. Peserta didik mengidentifikasi nilai Pancasila, memetakan kepentingan para pihak, memeriksa bukti, mempertimbangkan konsekuensi, dan merumuskan respons yang adil serta manusiawi. Pendekatan tersebut menggabungkan berpikir kritis dan empati sehingga Pendidikan Pancasila tidak kehilangan dimensi moralnya.

Guru dalam kerangka ini berfungsi sebagai fasilitator dialog dan model kewarganegaraan digital. Penelitian mengenai praktik guru di sekolah dasar Jakarta menunjukkan adanya variasi dalam mengintegrasikan nilai Pancasila ke aktivitas digital (Damanik et al., 2026a). Penelitian tentang calon guru juga menunjukkan bahwa digital citizenship mencakup literasi digital, standar perilaku, dan panduan moral (Prasetyo et al., 2022). Oleh karena itu, pengembangan profesional guru perlu mencakup kompetensi literasi digital, pedagogi dialogis, dan keteladanan etis.

Empati merupakan jembatan dari polarisasi menuju humanisasi. Di ruang digital, jarak psikologis membuat konsekuensi emosional dari sebuah komentar sering tidak terlihat. Pendidikan perlu membangun kemampuan mengambil perspektif orang lain. Penelitian van Boxtel et al. (2022) menunjukkan bahwa desain pembelajaran yang menggunakan kesaksian dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai empati. Temuan Wachs et al. (2023a) memperkuat bahwa empati dapat menjadi mekanisme penting dalam membangun keberanian melakukan counter-speech.

Pendidikan Pancasila juga perlu mengembangkan dialog dan deliberasi. Peserta didik tidak cukup diminta "rukun"; mereka perlu mengalami proses dialog yang memungkinkan

perbedaan hadir secara aman. Debat berbasis bukti, forum musyawarah, role play, studi kasus, dan proyek sosial digital dapat menjadikan kelas sebagai laboratorium demokrasi. Toleransi yang dibangun bukan toleransi pasif, melainkan kemampuan hidup bersama dalam perbedaan dengan tetap mengakui martabat pihak lain.

Berdasarkan sintesis tersebut, artikel ini menawarkan kerangka Pancasila Digital Humanism yang terdiri atas empat lapisan. Pertama, digital critical literacy, yaitu kemampuan memeriksa dan mengevaluasi informasi. Kedua, civic-ethical competence, yaitu pemahaman hak, kewajiban, norma, dan konsekuensi tindakan sebagai warga digital. Ketiga, humanistic competence, yang mencakup empati, penghormatan terhadap martabat, toleransi, dialog, dan pengelolaan konflik. Keempat, Pancasila civic action, yaitu tindakan nyata yang menghubungkan nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial dengan praktik digital.

Kerangka tersebut berbeda dari pendekatan yang menjadikan literasi digital sebagai tujuan akhir. Dalam Pancasila Digital Humanism, literasi digital adalah alat untuk mencapai kewarganegaraan yang bermartabat. Peserta didik bergerak dari pertanyaan "apakah informasi ini benar?" menuju "apa dampaknya bagi manusia lain?", "apakah cara saya menyebarkannya adil?", dan "bagaimana saya merespons perbedaan tanpa memperburuk konflik?". Pertanyaan tersebut mengubah pembelajaran dari kemampuan kognitif menjadi pertimbangan moral dan tindakan kewarganegaraan.

Sejumlah studi mendukung arah tersebut. Pendidikan Pancasila sebagai sumber etika digital menempatkan Pancasila sebagai kerangka normatif perilaku digital (Yusuf et al., 2024). Kajian generasi muda menunjukkan Pancasila tetap relevan sebagai kerangka etika ketika diintegrasikan dengan literasi digital dan pendidikan kewarganegaraan (Isdaryanto et al., 2025). Studi tentang pembelajaran daring berbasis digital citizenship juga menunjukkan peluang peningkatan pemahaman dan internalisasi nilai Pancasila pada Generasi Z (Antari, 2025). Penelitian terbaru mengenai integrasi kecerdasan buatan, etika digital, dan project-based learning menunjukkan arah baru dalam rekonseptualisasi pendidikan kewarganegaraan berbasis Pancasila (Damanik et al., 2026b).

Secara praktis, kerangka ini dapat diterapkan melalui lima pengalaman belajar: digital case inquiry, perspective-taking, deliberative dialogue, civic digital project, dan moral reflection. Peserta didik menganalisis kasus nyata, melihat persoalan dari perspektif berbeda, berdialog berbasis bukti, menghasilkan aksi digital yang konstruktif, kemudian merefleksikan keputusan dan dampaknya. Pola tersebut menghubungkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan tindakan sehingga nilai Pancasila dapat dialami, bukan sekadar dihafalkan.

Kerangka Pancasila Digital Humanism memiliki implikasi teoritis bahwa Pancasila perlu dipahami sebagai lived civic ethics, bukan hanya civic knowledge. Kewarganegaraan digital menjadi bagian dari praktik Pancasila kontemporer, sedangkan humanisasi menjadi jembatan antara pendidikan karakter, pendidikan kewarganegaraan, dan literasi digital. Bagi penelitian berikutnya, kerangka ini dapat diuji melalui penelitian tindakan kelas, eksperimen kuasi, atau mixed methods dengan mengukur literasi digital kritis, empati digital, toleransi, counter-speech, dan perilaku kewarganegaraan digital.

Keterbatasan artikel ini adalah sifatnya sebagai kajian konseptual sehingga belum menguji langsung efektivitas kerangka Pancasila Digital Humanism pada peserta didik

tertentu. Dinamika algoritma dan platform digital juga berubah cepat. Karena itu, penelitian empiris lintas jenjang dan konteks diperlukan agar kerangka yang ditawarkan dapat diuji, disempurnakan, dan dikembangkan menjadi model pembelajaran yang terukur.

Tabel 1. Pemetaan Tantangan Digital dan Reorientasi Nilai Pancasila

Tantangan digital	Risiko terhadap nilai	Orientasi humanistik
Disinformasi/hoaks	Keputusan tanpa dasar informasi memadai	Berpikir kritis dan tanggung jawab
Echo chamber/filter bubble	Fragmentasi perspektif	Dialog dan keterbukaan
Ujaran kebencian	Dehumanisasi dan diskriminasi	Empati dan martabat
Cyberbullying	Kekerasan simbolik	Kepedulian dan keberanian menolong
Polarisasi politik	Melemahnya persatuan dan musyawarah	Toleransi dan deliberasi
Budaya viral	Mengutamakan perhatian daripada kebenaran	Refleksi moral dan kehati-hatian

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan literatur yang dikaji.

Tabel 2. Kerangka Pancasila Digital Humanism dalam Pembelajaran

Dimensi	Kompetensi	Contoh pengalaman	Indikator
Literasi digital kritis	Verifikasi dan analisis sumber	Fact-checking kasus viral	Membedakan bukti, opini, manipulasi
Etika kewarganegaraan	Hak, kewajiban, tanggung jawab	Analisis dilema komentar	Mempertimbangkan konsekuensi
Humanisasi	Empati dan penghormatan martabat	Role play korban/pelaku	Memahami perspektif pihak lain
Dialog demokratis	Musyawarah dan toleransi	Deliberasi isu kontroversial	Berbeda secara argumentatif
Aksi Pancasila	Kolaborasi dan tanggung jawab sosial	Kampanye digital	Menghasilkan tindakan konstruktif

Sumber: Sintesis konseptual penulis.

SIMPULAN

Polarisasi digital menunjukkan bahwa tantangan Pendidikan Pancasila tidak lagi terbatas pada penguasaan pengetahuan kebangsaan, tetapi menyangkut kemampuan generasi muda menghidupkan nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan dalam ruang digital. Hasil kajian menegaskan perlunya reorientasi dari knowing Pancasila menuju living Pancasila melalui literasi digital kritis, empati, dialog, toleransi, tanggung jawab, dan refleksi moral. Kerangka Pancasila Digital Humanism menempatkan teknologi sebagai medium, sedangkan martabat manusia dan persatuan menjadi orientasi. Pendidik disarankan mengembangkan pembelajaran berbasis kasus digital, deliberasi, perspective-taking, dan aksi kewarganegaraan. Penelitian selanjutnya perlu menguji kerangka tersebut secara empiris pada berbagai jenjang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achdyat, A., Budimansyah, D., Nurdin, E. S., & Hidayat, M. (2025). A meta-analysis of the filter bubbles on social media: Research novelty and its implications for understanding the character of Pancasila. *International Journal of Education*.
- Akcıl, U., & Bastas, M. (2021). Examination of university students' attitudes towards e-learning during the COVID-19 pandemic process and the relationship of digital citizenship. *Contemporary Educational Technology*, 13(3), ep291. <https://doi.org/10.30935/cedtech/9341>
- Anjani, K. H., & Siwi, D. A. (2026). Implementasi literasi digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila kelas V sekolah dasar. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v12i01.12093>
- Antari, L. P. S. (2025). Revitalisasi nilai Pancasila dalam pembelajaran daring bagi Generasi Z: Studi eksperimen digital citizenship di perguruan tinggi. *Social Studies*.
- Berlian, M. F., Sukriono, D., & Untari, S. (2026). Development of citizenship virtual class media integrated with problem based learning to improve digital literacy of Pancasila education. *Jurnal Pendidikan PKN*, 7(1). <https://doi.org/10.26418/jppkn.v7i1.100742>
- Choi, M., Glassman, M., & Cristol, D. (2022). Digital citizenship in primary education: A systematic literature review describing how it is implemented. *Social Sciences & Humanities Open*, 5, 100348. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2022.100348>
- Damanik, P. C. I. C., Chaled, M. I., Husaeni, R. A., Uli, A. A., & Jayanti, F. D. (2026). Reconceptualizing Pancasila-based citizenship education in the digital age: Integrating artificial intelligence, digital ethics, and project-based learning. *Pendas*, 11(1). <https://doi.org/10.23969/jp.v11i01.42780>
- Damanik, P. C. I. C., Jayanti, F. D., Chaled, M. I., Uli, A. A., & Husaeni, R. A. (2026). Cultivating Pancasila values in the digital era through teacher practices in Jakarta elementary schools. *Jurnal Citizenship*, 9(2). <https://doi.org/10.12928/citizenship.v9i2.1986>
- Fatmawati, F., & Habibah, S. M. (2023). Aktualisasi praktik netizenship mahasiswa dalam good digital citizenship Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(1), 70–85. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i1.120>

- Haq, F. (2026). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun empati dan mencegah polarisasi sosial di kalangan Generasi Z. *Pelita*, 26(2). <https://doi.org/10.33592/pelita.v26i2.7602>
- Harianto, D. (2025). Pendidikan Pancasila di era disrupsi teknologi: Tantangan dan strategi. *Jurnal Profesi Kependidikan*.
- Hasanah, N., Elizar, & Munisah, E. (2026). Strengthening Pancasila values-based digital literacy in Pancasila Education learning in elementary schools. *International Journal of Elementary Education*, 10(1). <https://doi.org/10.23887/ijee.v10i1.111517>
- Isdaryanto, N., Saputro, I. H., & Lestari, E. Y. (2025). The relevance of Pancasila in the digital age amid shifting political orientations among Indonesian youth. *Unnes Political Science Journal*, 9(1). <https://doi.org/10.15294/upsj.v9i1.33198>
- Muhajir, M., Latief, A., & Tiara, M. (2025). Strengthening digital literacy and political culture for Gen-Z through Pancasila education learning in higher education. *Jurnal Civics*, 22(2). <https://doi.org/10.21831/jc.v22i2.89956>
- Naikofi, C. K., Tamonob, P. A., Naitboho, A. A., Halla, A. R., Bana, F., Mas'ud, F., & Dwiputra, R. (2025). Pancasila vs Polarisasi: Pertarungan nilai dalam membentuk sikap toleransi siswa masa kini. *Pendas*, 10(4). <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.36861>
- OECD. (2024). Managing screen time: How to protect and equip students against distraction. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/7c225af4-en>
- Pramesty, A. B., Mulyono, B., Murdiono, M., & Yumanda, D. (2026). Digital citizenship understanding as a predictor of students' ethical behavior on TikTok: Evidence from Indonesian madrasah students. *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial*.
- Prasetyo, W. H., Naidu, N. B. M., Tan, B. P., & Sumardjoko, B. (2022). Digital citizenship understanding amongst student teachers: Qualitative NVivo analysis. *Jurnal Civics*, 19(1), 9–20. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i1.46888>
- Ridha, M. K., Mulyono, B., & Yulianto, E. M. (2025). Algorithmic echo chamber as a challenge of digital citizenship in discourse polarization on TikTok social media. *Jurnal Pendidikan PKN*, 6(2). <https://doi.org/10.26418/jppkn.v6i2.99133>
- Silaen, R. N., & Najicha, F. U. (2023). The implementation of Pancasila values, fair and civilized humanitarian principles in using social media. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 2(2). <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v2i2.75790>
- Sriwahyuni, S., Haris, H., Bakhtiar, B., Suyitno, I., Najamuddin, N., & Sahabuddin, R. (2026). Technology-based Pancasila Education and student motivation and digital literacy in Jeneponto vocational schools. *JED: Jurnal Etika Demokrasi*. <https://doi.org/10.26618/7kcyqh20>
- UNESCO. (2024). Global citizenship education in a digital age: Teacher guidelines. UNESCO.
- UNESCO. (2026). Addressing hate speech through global citizenship education: A handbook for educators. UNESCO.
- UNESCO. (2026). Education for just and democratic societies. UNESCO.
- van Boxtel, C., et al. (2022). Using eyewitnesses to promote students' understanding of empathy in the history classroom. *The Journal of Social Studies Research*. <https://doi.org/10.1016/j.jssr.2022.12.001>

- Wachs, S., Castellanos, M., Wettstein, A., Bilz, L., & Gámez-Guadix, M. (2023). Associations between classroom climate, empathy, self-efficacy, and countering hate speech among adolescents. *Journal of Interpersonal Violence*, 38(5–6), 5067–5091. <https://doi.org/10.1177/08862605221120905>
- Wachs, S., Krause, N., Wright, M. F., & Gámez-Guadix, M. (2023). Effects of the prevention program HateLess on adolescents' empathy, self-efficacy, and countering hate speech. *Journal of Youth and Adolescence*, 52, 1115–1128. <https://doi.org/10.1007/s10964-023-01753-2>
- Wachs, S., Wright, M. F., Gámez-Guadix, M., et al. (2024). From hate speech to HateLess: The effectiveness of a prevention program on adolescents' online hate speech involvement. *Computers in Human Behavior*, 157, 108250. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108250>
- Widyati, E., Pratiwi, I., Hasmitawati, Budiman, H., & Rasyani, D. (2026). Implementasi etika dan pendidikan membangun karakter di era digital. *Didaktik*, 12(1). <https://doi.org/10.36989/didaktik.v12i01.11361>
- Yulianti, E. D., Tarsidi, D. Z., & Sukarno. (2026). Studi fenomenologi tentang penguatan digital citizenship berbasis literasi digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah dasar. *Didaktika Dwija Indria*, 14(5).
- Yusuf, N., Wibowo, A. P., & Budiono. (2024). Digital citizenship education: Pancasila as a source of digital ethics in Indonesia. *JED: Jurnal Etika Demokrasi*, 9(1). <https://doi.org/10.26618/jed.v9i1.11721>